

Judul : Malas Rapat Rajin Pelesiran
Tanggal : Sabtu, 18 Mei 2013
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Malas Rapat Rajin Pelesiran

SUARA rakyat ialah suara Tuhan. Penyelenggara negara seharusnya mendengar suara rakyat. Terlebih anggota DPR, yang katanya representasi rakyat, semestinya lebih lebar membuka telinga, mendengar suara rakyat.

Namun, sebagian anggota dewan seperti menutup telinga rapat-rapat. Sekeras apa pun berteriak, suara rakyat tak terdengar oleh mereka. Walaupun terdengar, hanya masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan.

Anggota dewan seperti sakit telinga, bahkan tuli. Mereka kian tidak peduli dengan suara rakyat, tetapi lebih asyik dengan urusan mereka sendiri yang dikemas seolah-olah demi kepentingan rakyat.

 **Badan Kehormatan DPR perlu mengumumkan anggota dewan yang absen mengikuti rapat-rapat, tetapi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri."**

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: mefrotvnews.com

Salah satu yang selalu membuat rakyat gemas dan marah ialah tidak kapok-kapoknya anggota dewan melakukan kunjungan ke luar negeri dengan dalih studi banding. Sudah tak terhitung kecaman kepada DPR terkait dengan kunjungan ke mancanegara yang tak ubahnya seperti pelesiran tersebut.

Kegiatan itu dituding hanya menghabiskan anggaran negara untuk hal yang tidak efektif dan pada gilirannya justru merontokkan citra DPR.

Namun, itu semua tak membuat mereka surut dan pantang berubah. Bahkan, menurut temuan Indonesia

Budget Center, pada 2013 ini diperkirakan ada kenaikan anggaran pelesiran DPR sebesar 77% jika dibandingkan dengan anggaran 2012. Anggaran kunjungan ke luar negeri dewan naik dari Rp139,9 miliar menjadi Rp248 miliar.

Meski kabarnya DPR telah memangkas 60% anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, nyatanya agenda-agenda pelesiran baru terus disiapkan. Ironisnya, rencana itu muncul pada saat DPR tengah disorot publik terkait dengan kemalasan anggota dewan menghadiri rapat paripurna. Ibaratnya, mereka malas di dalam, tapi rajin ke luar.

Seolah tak mendengar semua masukan dan kecaman, Komisi VII DPR mengagendakan kunjungan ke tiga negara, yakni China (14-19/5), Norwegia (19-25/5), dan Selandia Baru (30 Juni-4 Juli), untuk belajar soal energi. Dalihnya hasil kunjungan itu akan dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan energi nasional bersama Dewan Energi Nasional.

Pertanyaannya, kenapa mesti ke luar negeri? Bukankah komisi yang membawahkan urusan energi itu akan lebih baik memanfaatkan waktu saat ini untuk mengurai ketidakpastian rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah?

Bukankah lebih baik energi dan waktu mereka dimaksimalkan untuk mendesak pemerintah mengembangkan energi terbarukan sekaligus mempercepat konversi BBM ke bahan bakar gas yang masih jalan sangat lambat?

Semestinya Komisi VII menyetop rencana kunjungan tersebut karena bulan lalu pimpinan DPR telah memutuskan memangkas 60% agenda kunjungan kerja ke luar negeri, terutama jika tidak terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang dan perhelatan internasional?

Sungguh tidak elok bila DPR memaksakan agenda kunjungan ke luar negeri yang mereka sendiri tahu hanya menghabiskan anggaran negara.

Badan Kehormatan DPR perlu mengumumkan anggota dewan yang absen mengikuti rapat-rapat, tetapi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dari situ publik tahu para anggota dewan yang berperilaku tidak patut seperti itu dan publik tidak memilih mereka dalam pemilu mendatang.